HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan

EDISI SELASA, 24 JUNI 2025

02 **POLITIC**
DIM RUU KUHAP Sudah Diteken, Kapan Dibuka ke Publik?

05 **NUSANTARA**
Menanti Kuota Haji 2026 Diumumkan 10 Juli

10 **LISTSTYLE**
Tren Warna dan Tekstur Tas Spring-Summer Tahun 2025

USAI NADIEM DIPERIKSA 12 JAM
'TERIMA KASIH DAN IZINKAN SAYA PULANG'

Nadiem Makarim diperiksa selama 12 jam di Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook 2020-2022 senilai Rp 9,9 triliun, ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).Dalam pernyataan setelah kelar diperiksa, Nadiem mengatakan akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah dibangun bersama. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun sudah ada sederet nama yang diperiksa sebelum Nadiem. Ada para mantan Staf Khusus Mendikbudristek Jurist Tan, Fiona Handayani, dan Ibrahim Arief. Kemudian dari pihak swasta inisial ANT yaitu mantan Direktur Operasional PT Zyrexindo Mandiri Buana. Selanjutnya, pejabat Kemendikbudristek di Direktorat Sekolah Menengah Pertama dan Direktorat Sekolah Dasar, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan juga konsultan teknis Kemendikbudristek atas nama Ibrahim Arief. Kalangan pemerhati pendidikan mengatakan terus terulangnya korupsi di bidang ini berakar dari tata kelola yang tidak akuntabel. Walhasil, kebijakan digitalisasi malah berbuah kasus korupsi.

BACA HAL 11...

Kronologi Singkat

- **Periode Korupsi:** 2019–2023
- **Diselidiki sejak:** 2020
- **Instansi Terlibat:** Kemendikbudristek
- **Penyelidik:** Kejaksaan Agung (JamPidsus)

Modus Dugaan Korupsi

- Penggantian spesifikasi laptop Windows ke Chromebook
- Dilakukan tanpa analisis kebutuhan yang valid
- Pengadaan dilakukan meski diikuti oleh sekolah yang tidak siap atau mengalami masalah jaringan

Terduga Korupsi

- **Terduga:** FHI – Fungsionalis Kemendikbud Bidang TIK Sub Strategis
- **Instansi Terlibat:** Direktorat Sekolah Dasar
- **Status Hukum Terkini:**
  - Tahap:Penyelidikan
  - Tersangka: Belum ada

Anggaran Pengadaan

Total Anggaran
RP 9.9 TRILIUN

Pengadaan Peralatan TIK
RP 5.8 TRILIUN

Dana Alokasi Khusus (DAK)
RP 3.9 TRILIUN

Lokasi Penggeledahan

- **Lokasi Geledah:**
  - Apartemen Green
  - PramukaApartemen Signature H Tower, Jakarta
- **Barang Bukti:** Uang tunai Rp 500 juta, Laptop, Dokumen, Flashdisk

Kemungkinan Diperiksa

- **Pihak Lain:** Pejabat Kementerian dan Pengusaha
- **Fokus Penyelidik:**
  - Tata kelola sistem DAK
  - Proses pengadaan barang

Skandal Cromebook Rp 9.9 T

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (kiri) didampingi sejumlah kuasa hukum menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/6/2025).(ist)

Iran-Israel Terus Berbalas Serangan

PERTAMINA ALIHKAN RUTE KAPAL KE INDIA DAN OMAN

Sehari setelah Amerika Serikat membom fasilitas nuklir, Iran dan Israel terlibat saling serang dengan intensitas yang hebat, Senin (23/6/2025). PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz oleh Iran dengan mengalihkan rute kapal pengangkut minyak mentah ke Oman dan India.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan Selat Hormuz merupakan rute bagi 20 persen pelayaran minyak mentah global.

Dikatakan Fadjar, jika Iran memutuskan menutup selat tersebut, maka otomatis akan berdampak pada distribusi minyak mentah dunia.

"Pertamina telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengamankan kapal kita, mengalihkan rute kapal ke jalur aman antara lain melalui Oman dan India untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok," jelas Fadjar dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Di sisi lain, sejauh ini pasokan minyak mentah di dalam negeri masih dalam kondisi aman. "Secara umum pasokan kita masih terkendali," ungkapnya.

Sementara itu, Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) perusahaan masih aman, di tengah adanya ancaman Iran menutup Selat Hormuz akibat memanasnya konflik Iran-Israel.

"Untuk stok (BBM) saat ini aman," kata Heppy, seperti dikutip Senin (23/6/2025).

Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat sejak Jumat (13/6) ketika Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir.

Serangan Israel memicu Teheran untuk melancarkan serangan balasan ke sejumlah titik di negara tersebut pada hari yang sama.

Presiden AS Donald Trump pada Minggu (22/6/2025) pagi menyatakan bahwa militer AS telah bergabung melancarkan serangan terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan.

Menyusul serangan AS, Parlemen Republik Islam Iran pada Minggu telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kegiatan pelayaran. Meski begitu penutupan Selat Hormuz masih harus menunggu keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

AS Minta Bantuan China

Terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio meminta pemerintah China untuk membujuk Iran agar tidak menutup perairan di Selat Hormuz. Permintaan ini disampaikan setelah tiga fasilitas nuklir Iran dibombardir oleh pesawat pengebom AS.

Pernyataan Rubio itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (23/6/2025), disampaikan setelah media Press TV melaporkan parlemen Iran menyetujui langkah untuk menutup Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20 persen permintaan minyak dan gas global.

"Saya mendorong pemerintah China di Beijing untuk menghubungi mereka (Iran-red) tentang hal itu, karena mereka sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk minyak mereka," ucap Rubio dalam wawancara dengan program Fox News 'Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo'.

"Jika mereka melakukan itu, hal itu akan menjadi kesalahan terbesar lainnya. Itu akan menjadi bunuh diri ekonomi bagi mereka jika mereka melakukannya. Dan kami memiliki opsi untuk mengatasinya, tetapi negara-negara lainnya juga harus mempertimbangkannya," sebutnya.

"Itu akan merugikan ekonomi negara-negara lainnya jauh lebih buruk daripada ekonomi kami," kata Rubio yang juga menjabat sebagai penasihat keamanan nasional AS.

Rubio mengatakan langkah untuk menutup Selat Hormuz akan menjadi eskalasi besar-besaran yang akan membutuhkan tanggapan dari AS dan negara-negara lainnya. (wid,rtr, afp,ves/dya)

Tentang Selat Hormuz

- **Menghubungkan Iran dan Oman**
  Menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman; satu-satunya jalur keluar-masuk kapal dari kawasan Teluk ke Samudra Hindia.
- **Memiliki Lebar 33 Kilometer**
  Di titik tersempit, lebarnya hanya 33 km. Lalu lintas diatur lewat Traffic Separation Scheme oleh IMO.
- **Tempat Transit Terpenting di Dunia**
  Pada 2023, Selat Hormuz dilalui lebih dari 20 juta barel per hari minyak dan produk olahan, mencakup sekitar 30% perdagangan minyak global, dengan 70% di antaranya dikirim ke Asia — terutama Tiongkok, India, dan Jepang.

Para pengunjuk rasa di Los Angeles, AS berdemo menentang keputusan Donald Trump menyerang situs nuklir Iran.(ist.getty)

Warga AS hingga Eropa Demo Kutuk Serangan Trump

RIBUAN warga dari berbagai negara menggelar aksi unjuk rasa yang mengutuk serangan Amerika Serikat ke Iran. Masyarakat Asia, AS, hingga Eropa berkumpul di berbagai kota untuk melayangkan protes terhadap serangan AS ke tiga fasilitas nuklir Iran.

Dilansir dari NBC News, Senin (23/6/2025) protes terjadi di New York, AS. Sekelompok warga berkumpul di Times Square sembari memegang bendera dan simbol anti perang.

Demonstrasi ini diprakarsai oleh Answer Coalition. Mereka mendesak AS dan Israel berhenti menyerang Iran dan kedaulatan negara itu.

"Kami berkumpul di sini hari ini karena masyarakat AS tidak ingin perang dengan Iran," kata Gabriela Silva, bagian dari Party for Socialism and Liberation.

"Trump dan Netanyahu melakukan serangan ilegal yang sepenuhnya tidak beralasan dan ilegal ke Iran, yang amat kami tentang," lanjutnya.

Hal serupa terjadi di Washington DC dan Boston. Para demonstran khawatir AS akan terlibat dalam konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan. "Rakyat Amerika tidak ingin perang yang tak berkesudahan. Mereka ingin anggaran dialihkan untuk kebutuhan rakyat!" demikian unggahan dari Partai Sosialisme dan Pembebasan di platform X.

Pengunjuk rasa juga menyebut pemboman Trump terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai kejahatan perang yang melanggar Piagam PBB, hukum internasional, dan Konstitusi AS.

Sementara itu, para demonstran yang berkumpul di luar Gedung Putih membawa spanduk bertuliskan, "Tidak Ada Perang terhadap Iran! Trump adalah Penjahat Perang!"

Koalisi anti-perang ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism) menjadi salah satu penyelenggara utama aksi ini. ANSWER dikenal sebagai kelompok kiri yang aktif dalam memobilisasi demonstrasi menentang perang di Irak dan Afghanistan, serta intervensi militer AS lainnya.

Kelompok ini juga menjadi bagian dari protes nasional yang berlangsung usai pelantikan Trump sebelumnya. Seruan protes nasional dan internasional Aksi puncak protes tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni mendatang di Ibu Kota AS, bertajuk "Stop the War on Iran". (wid,rtr,ist/dya)

DIM RUU KUHAP SUDAH DITEKEN, KAPAN DIBUKA KE PUBLIK?

Pemerintah resmi menandatangani naskah daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP. DIM RUU KUHAP dari pemerintah segera diserahkan ke DPR. Kapan masyarakat bisa mengakses?

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej meminta publik untuk tidak menanyakan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang disusun pemerintah. Eddy, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa yang berwenang untuk membuka DIM tersebut adalah pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah menerima DIM dari pemerintah.

"Etikanya begitu ya, jadi jangan dikejar-kejar mana daftar inventaris masalahnya, jangan, tunggu dari DPR, DPR akan membuka kepada publik," kata Eddy di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Kendati demikian, pemerintah masih menunggu undangan dari DPR untuk menyerahkan naskah DIM tersebut. "Ya, menunggu undangan dari DPR, betul (besok) pembukaan masa sidang (DPR) tapi kan kita tidak bisa ngatur-ngatur DPR harus mengundang kita, nanti DPR akan mengundang, yang penting kita sudah memberitahu bahwa naskah itu sudah siap," ucap Eddy.

Eddy menyebutkan, ada sekitar 6.000 poin dalam DIM RUU KUHAP buatan pemerintah. Ia mengeklaim, DIM itu disusun berdasarkan aspirasi yang dijaring dari perguruan tinggi, kementerian/lembaga, advokat, dan koalisi masyarakat sipil.

"Meskipun tidak semua masukan itu akan kita tuangkan. Tetapi kita secara fair akan memberitahu kepada DPR bahwa ini adalah hasil penyusunan yang kita ambil dari masukan masyarakat sipil, dari ahli maupun dari teman-teman advokat," kata Eddy.

Berharap Januari 2026 Berlaku

Diberitakan sebelum- nya, pemerintah telah menandatangani naskah DIM RUU KUHAP Naskah DIM RUU KUHAP diteken oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisaai Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Senin (23/6/2025).(ist)

"Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum, dengan kehadiran Yang Mulia Ketua MA, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, bersama dengan Bapak Pak Menseneg bisa melahirkan sebuah DIM sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diyakinkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat," kata Menteri Hukum Supratman dalam pidatonya.

"Tentu ini menggambarkan cita-cita presiden, ingin mewujudkan sebuah pemerintahan di mana seluruh bagian dari pemerintahan kompak, dan bisa satu dalam sebuah tindakan," imbuh dia.

Supratman mengatakan, hal ini merupakan harapan besar dalam hukum di Indonesia. Dia berharap RUU KUHAP nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional."Mudah-mudahan, dengan pemerlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di 1 Januari tahun 2026, Hukum Acara kita juga sudah bisa berlaku," ucap dia. (din wid rls,ant/dya)

Komnas HAM Sodorkan 10 Rekomendasi

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan 10 poin rekomendasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa poin rekomendasi yang pertama, yaitu ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan yang memberikan mandat besar kepada aparat penyidik, termasuk terkait dengan wewenang upaya paksa, harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme pengawasan yang ketat.

"Hal ini untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban. Selain itu, harus ada pembatasan waktu dalam proses penyidikan dan penyelidikan," kata Atnike dalam keteranganny.

Poin rekomendasi yang kedua, yakni penggunaan kewenangan upaya paksa sebaiknya secara ketat dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur, serta dibukakan peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengajukan keberatan.

Ketiga, Komnas HAM merekomendasikan agar ketentuan mengenai mekanisme praperadilan sebaiknya dirumuskan ulang agar mampu menjadi mekanisme yang secara materiel mewakili kepentingan tersangka, korban, dan masyarakat umum yang berhak atas keadilan.

Dalam hal ini, Komnas HAM memandang mekanisme praperadilan tidak hanya menguji aspek formal (formil) dalam penyelidikan dan penyidikan serta penggunaan upaya paksa yang dimiliki penyelidik maupun penyidik.

"Serta masa sidang praperadilan harus dilakukan dalam 14 hari kerja dan perkara pokok belum bisa dilimpahkan sebelum praperadilan diputuskan," katanya pula.

Rekomendasi yang keempat, yaitu mekanisme keadilan restoratif harus atas persetujuan dari korban dengan ditetapkan pengadilan. Penyidik yang menangani perkara direkomendasikan untuk tidak boleh menjadi mediator.

Hal itu, menurut Komnas HAM, untuk menghindari terjadinya potensi transaksional antara korban dan pelaku, khususnya korban yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, dan akses bantuan hukum.

Kelima, Komnas HAM merekomendasikan pembentuk undang-undang, yakni Pemerintah dan DPR untuk mesti menyelaraskan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, ahli, dan korban dengan ketentuan yang diatur dalam RUU KUHAP dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Keenam, Perhatian juga harus diberikan kepada kelompok masyarakat adat. Dalam pengaturan KUHAP, harus memperhatikan hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau living law," imbuh Atnike.

Poin rekomendasi yang ketujuh adalah bantuan hukum juga harus dapat diberikan kepada tersangka dan terdakwa dengan hukuman di bawah 5 tahun, sementara bantuan kepada korban diberikan mulai dari penyelidikan sebagai awal peradilan pidana.

Kedelapan, Komnas HAM memberi rekomendasi tentang ketentuan jangka waktu banding yang singkat.

Atnike menyebut sebaiknya Pemerintah dan DPR memberikan waktu yang cukup bagi para pihak, khususnya terdakwa atau kuasa hukumnya yang ingin mengajukan banding untuk mempersiapkan permohonan dan memori banding secara komprehensif.

Rekomendasi kesembilan, yaitu RUU KUHAP diharapkan dapat mengakomodasi kemungkinan mekanisme pengujian admisibilitas (keadaan dapat diterimanya suatu bukti sebagai alat bukti dalam sidang) terhadap alat-alat bukti.

Menurut Komnas HAM, pengujian admisibilitas demi memastikan bahwa alat-alat bukti diperoleh dengan cara-cara yang layak, patut, dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan.

"Sepuluh, ketentuan mengenai koneksitas, RUU HAP (KUHAP, red.) sebaiknya memperjelas kriteria 'titik berat kerugian' dalam menentukan suatu perkara," kata Atnike.

Kesepuluh poin rekomendasi tersebut telah resmi disampaikan Komnas HAM kepada Pemerintah melalui Kementerian Hukum pada Jumat (20/6/2025).

Atnike bersama Ketua Tim Kajian RUU KUHAP Abdul Haris Semendawai diterima oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan. (wid,rls,ant/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

WAMENDAGRI SEBUT 43 PULAU TERCATAT DALAM SENGKETA, JATIM TERBANYAK

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan saat ini ada sebanyak 43 pulau di seluruh Indonesia yang tercatat dalam sengketa.

Sengketa kepemilikan pulau bukan hanya terjadi antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan ada 43 pulau yang tercatat dalam kasus sengketa.

Kemendagri terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pencatatannya."Jadi ada 43 pulau di seluruh Indonesia yang saat ini tercatat dalam sengketa," kata Bima di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah sengketa pulau terbanyak. Adapula sengketa di wilayah provinsi Kepulauan Riau.

"Ada sengketa di dalam wilayah provinsi, ada sekitar 21. Paling banyak itu di Jawa Timur. Dan ada sengketa antar provinsi di Kepulauan Riau, ada sekitar 22," sebutnya.

Bima menjelaskan, pola sengketa yang terjadi memiliki kemiripan dengan yang sebelumnya pernah terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara. Secara umum, satu pihak sudah lebih dahulu mendaftarkan titik koordinat pulau tertentu, sementara pihak lain belum melakukan pendaftaran.

"Sengketa ini kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti historis oleh masing-masing pihak," ungkapnya.

"Jadi polanya agak mirip. Penyelesaiannya cenderung panjang, dan bagi yang belum tuntas, maka wilayah tersebut ditetapkan terlebih dahulu sebagai cakupan provinsi," tambah dia.

Bima juga menyinggung bahwa pulau di Indonesia tidak bisa dimiliki oleh pribadi secara penuh atau 100 persen. Melainkan ada batasannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Poin kedua, tidak ada pulau di republik ini yang bisa dikuasai, dimiliki oleh pribadi atau individual secara 100 persen," jelasnya.

Belajar dari Kasus Aceh-Sumut

Soal polemik kepemilikan 13 pulau di pesisir perairan selatan Jawa Timur antara Trenggalek dan Tulungagung diketahui Mendagri Tito Karnavian turun langsung memimpin proses evaluasi mengenai sengketa tersebut.

"Kemarin Pak Menteri langsung memimpin proses evaluasi soal sengketa 13 pulau di Trenggalek itu," kata Wamendagri Bima Arya kepada wartawan di Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6/2025).

Bima menyebut, dalam penyelesaian sengketa ini, Kemendagri akan belajar dari polemik kepemilikan 4 pulau yang sempat terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara. Dia memastikan akan berhati-hati memperhatikan sejarah masa lalu.

"Yang pasti belajar dari sengketa 4 pulau di Aceh, tentu kami hati hati. Tidak saja data geografis tetapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri. Kami berhati-hati sekali," tuturnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengaku pihaknya telah menghimpun keterangan dari kedua wilayah. Kini seluruhnya tengah dipelajari.

"Dua versi dari teman-teman di daerah itu masih kami dalami dokumennya. Nanti pasti kita pelajari soal dokumennya, perkembangannya," pungkas Bima.

Sebelumnya, dilansir detikJatim, polemik kepemilikan 13 pulau di pesisir perairan selatan Jawa Timur antara Trenggalek dan Tulungagung terjadi setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2022. Trenggalek yang mencatatkan kewilayahan terlebih dahulu kemudian merasa keberatan.

Sebanyak 13 pulau yang dimaksud adalah Pulau Anak Tamengan, Pulau Anakan, Pulau Boyolangu, Pulau Jewuwur, Pulau Karangpegat, Pulau Solimo, Pulau Solimo Kulon, Pulau Solimo Lor, Pulau Solimo Tengah, Pulau Solimo Wetan, Pulau Sruwi, Pulau Sruwicil, dan Pulau Tamengan.

Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Trenggalek Teguh Sri Mulyanto mengatakan, secara gugusan, pulau itu telah tercatat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Trenggalek sejak 2012. Hal itu sejalan dengan RTRW dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kalau tidak salah di tahun 2009 kami pernah mengikuti sosialisasi Kemendagri, pulau-pulau itu masih merah, masuk Trenggalek dan Tulungagung. Baru pada 2022 muncul Kemendagri dan yang 13 pulau masuk Tulungagung," kata Teguh, Rabu (18/6/2025).

Menurutnya, pencatatan 13 pulau tersebut ke Tulungagung langsung menimbulkan reaksi dari pemerintah daerah. Sebab belasan pulau tersebut lebih dekat dengan wilayah Trenggalek dan telah dicatatkan sebelumnya dalam RTRW Jawa Timur maupun Trenggalek.

Pasca Kepmendagri tersebut Pemkab Trenggalek mengajukan protes ke Kemendagri melalui Pemprov Jatim. Terkait polemik itu pihaknya telah beberapa kali melakukan mediasi dengan Pemkab Tulungagung, namun tidak ada kesepakatan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menanggapi santai terkait polemik kepemilikan 13 pulau. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Tulungagung Agus Eko Putranto, mengaku enggan berpolemik terkait pulau-pulau tersebut. Pihaknya hanya berpedoman dengan keputusan dari pemerintah pusat.

"Kalau Tulungagung intinya kami kembalikan ke Kementerian Dalam Negeri, karena itu produk hukum dari sana," kata Agus Eko.

Pihaknya mengaku akan menjalankan apapun yang menjadi keputusan Kemendagri. Diakui sebelumnya munculnya Kemendagri terbaru tahun 2025, pihaknya telah beberapa kali duduk bersama Pemkab Trenggalek untuk membahas persoalan tersebut."Tapi tidak ada titik temu," ujarnya.(wid,ant, rls,ist/dya)

Kasus-kasus Sengketa Kepemilikan Pulau

- **Sengketa Pulau Berhala, Rebutan Kepri dan Jambi**
  Sengketa bermula sejak 1984 antara Jambi dan Riau (sebelum Kepri terbentuk). Jambi berdasar pada makam Datuk Paduka Berhalo, Riau mengacu pada prasasti Belanda 1957. Setelah Kepri terbentuk (2002) dan Lingga didirikan (2003), pulau ini dinyatakan masuk Kepri. Meski sempat dimenangkan Jambi lewat Permendagri 22/2011, Mahkamah Konstitusi membatalkannya pada 2012. Kini Pulau Berhala sah milik Kepri.

- **Gugus Pulau Tujuh, antara Kepri dengan Bangka Belitung**
  Pulau Tujuh lebih dekat ke Bangka Belitung (2 jam perjalanan) dibanding Lingga, Kepri (8 jam). UU 27/2007 menyebut wilayah Babel, namun UU 31/2003 menyatakan milik Kabupaten Lingga. Akibatnya, hingga kini sengketa belum tuntas.

- **Kepulauan Seribu, Antara Banten dan Jakarta**
  DKI Jakarta menetapkan Kepulauan Seribu sebagai bagian wilayahnya lewat UU 34/1999 dan PP 5/2001. Banten mengklaim berdasarkan UU 22/1999. Pemerintah pusat menegaskan 22 pulau itu sah milik Jakarta sesuai aturan yang berlaku.

MENANTI KUOTA HAJI 2026 DIUMUMKAN 10 JULI

Indonesia belum mendapat informasi jumlah kuota haji untuk tahun depan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan kuota haji 2026 baru akan diumumkan pada 10 Juli 2025.

Kloter 5 Debarkasi Palembang Tiba di Tanah Air, Seorang Jemaah Kloter 18 Ikut Pulang Melalui Program Tanazul. (Kemenag Sumsel)

Pemerintah Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji menetapkan sejumlah aturan ketat dalam penyelenggaraan haji, salah satunya melalui pengaturan kuota. Untuk jatah tahun depan, jumlah jamaah masing-masing negara dikabarkan akan diumumkan pada 10 Juli mendatang.

"Pengumuman secara resmi direncanakan pada 10 Juli 2025 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1447 H melalui kanal resmi masar nusuk atau e-Hajj," kata Hilman di Madinah, dikutip dari situs Kemenag, Senin (23/6/2025).

Pada tahun-tahun sebelumnya, Arab Saudi mengumumkan kuota haji setelah berakhirnya musim haji pada 12 Zulhijah bertepatan dengan perayaan malam penutupan haji. Menurut keterangan Kemenag, tahun ini pada malam tersebut, Arab Saudi hanya mengumumkan timeline penyelenggaraan haji 2026.

"Saat ini, pemerintah Arab Saudi tengah membangun kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh negara pengirim jemaah haji mengenai pola penyelenggaraan haji tahun depan, saat mana kuota resminya baru akan ditetapkan pada bulan depan," jelas Hilman.

Soal Catatan Haji RI 2025

Diketahui, setelah berakhirnya musim haji, Arab Saudi memberikan sejumlah catatan penyelenggaraan haji Indonesia 2025. Dalam nota diplomatik yang disampaikan Dubes Arab Saudi, catatan itu berisi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan haji mulai dari fase kedatangan hingga pelaksanaan ritual haji.

Salah satu poinnya menyoroti kegagalan Indonesia dalam mematuhi pedoman dan ketentuan kesehatan jemaah haji. Hal ini dinilai menyebabkan tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia. Selain itu, pengangkutan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah juga dinilai tak sesuai prosedur.

Ditanya soal apakah catatan dalam nota diplomatik itu akan berdampak pada alokasi kuota haji 2026, Hilman memastikan tak ada implikasi terkait itu.

"Catatan yang tercantum dalam nota diplomatik bersifat sebagai saran perbaikan, bukan teguran atau sanksi, serta tidak berimplikasi pada pengurangan kuota haji Indonesia," tegasnya.

Sempat Ada Wacana Kuota Haji 2026 Dipotong

Wacana pemotongan kuota haji 2026 sempat mencuat ke publik. Wacana ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf usai bertemu dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah pada Selasa (10/6/2025).

Gus Irfan, sapaannya, menyebut Arab Saudi berwacana memangkas 50 persen kuota haji Indonesia 2026.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," jelas Gus Irfan dalam keterangannya.

Terpisah, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan wacana pemotongan kuota haji 2026 muncul buntut penyelenggaraan haji Indonesia 2025 yang dinilai agak buruk.

"Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ujar Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," katanya.

Dalam perkembangannya, BP Haji memastikan wacana pemotongan kuota haji 2026 dibatalkan. (din,ist,dtc,rls/dya)

Sebanyak 365 Jamaah Haji RI Meninggal Dunia

OPERASIONAL penyelenggaraan haji Indonesia 1446 H/2025 M memasuki fase pemulangan jemaah. Hingga Senin (23/6/2025) pukul 14.30 WIB, sebanyak 365 jamaah dilaporkan meninggal dunia.

Data jamaah wafat ini diambil dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Mayoritas jamaah wafat adalah lanjut usia (lansia).

Dilihat dari lokasi wafat, mayoritas jamaah meninggal dunia di Makkah, mencapai 283 orang. Kemudian secara berturut-turut 34 orang di Madinah, 20 orang di Mina, 15 orang di bandara, dan 13 orang di Arafah.

Grafik kematian per hari fluktuatif tapi cenderung meningkat. Lonjakan terjadi pada 8 Juni 2025 dengan total 17 kematian. Setelah itu turun di angka 16-12 kematian per hari.

Berdasarkan sebaran embarkasi, jemaah wafat terbanyak berasal dari Embarkasi Surabaya (SUB). Tercatat ada 74 jamaah wafat. Kemudian tiga teratas berikutnya ada Embarkasi Solo (44), Embarkasi Jakarta Bekasi (43), dan Embarkasi Jakarta Pondok Gede (37).

Selain laporan jamaah wafat, ada tiga jamaah yang hingga kini masih hilang, belum kembali ke kloter. Tiga jemaah ini adalah lansia dengan riwayat demensia.

Berdasarkan keterangan Kemenag, tiga jamaah hilang adalah Nurimah Mentajim (80) dari kloter 19 Embarkasi Palembang, Sukardi (67) dari kloter 79 Embarkasi Surabaya, dan Hasbullah (73) dari kloter 07 Embarkasi Banjarmasin.

Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi Kolonel Laut Harun Arrasyid mengatakan upaya pencarian masih dilakukan.

"Kita masih berusaha mencari tiga jemaah tersebut," kata Harun di Makkah kemarin, dikutip dari situs Kemenag, Senin (23/6/2025).

Harun menyebut upaya pencarian jemaah hilang melibatkan syarikah dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

"Kami terus melakukan pencarian dalam plan A dan plan B. Koordinasi tak henti kita lakukan dengan syarikah, KJRI dan Konsultan Haji di Jeddah," jelasnya.

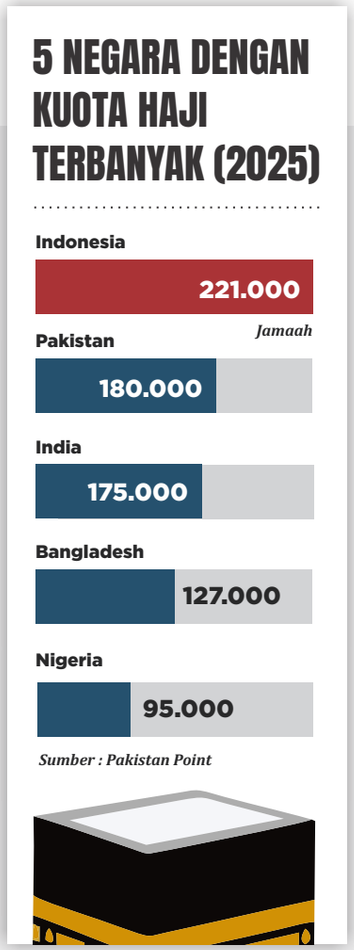

Petugas melakukan penyisiran ke rumah sakit dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah, ke Mu'aisyim, dan hotel-hotel jamaah.(wid,rls/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Program Transjatim dan BTS di Kota Malang

DPRD Kawal Regulasi Pemberdayaan Sopir Angkot

(Ilustrasi) Angkutan Kota (Angkot) di Terminal Arjosari, Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG- DPRD Kota Malang berkomitmen mengawal pembentukan regulasi, yang menjamin pemberdayaan sopir angkutan kota (angkot). Hal ini terkait pelaksanaan program Transjatim dan skema Buy The Service (BTS).

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan keterlibatan angkot sebagai feeder atau pengumpan dari rute utama Transjatim, dinilai perlu diimbangi dengan perlindungan dan kepastian peran bagi para sopir.

"Itu yang nanti akan kami bicarakan. Pasti nanti akan didukung oleh regulasi. Kami juga akan mendorong itu. Karena bagaimanapun, masak iya kita cuma memakai kendaraannya saja, tetapi gak memberdayakan mereka. Kan mereka salah satu dari masyarakat yang butuh difasilitasi," ujar Amithya, Senin (23/6/2025).

Menurutnya, dewan akan memastikan agar perencanaan sistem transportasi publik ini tidak hanya menyasar kenyamanan dan efisiensi rute. Tetapi juga menyentuh aspek sosial ekonomi pelaku transportasi yang selama ini telah beroperasi di lapangan.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini menjelaskan pembahasan lebih lanjut terkait penerapan Transjatim termasuk BTS di Kota Malang, baru akan dilaksanakan tahun 2026 mendatang.

"Kemarin sih kami sudah menerima uraiannya terkait BTS. Nah ini nanti yang akan kami bicarakan lebih lanjut. Kalau gak salah, BTS kan tidak dilaksanakan tahun ini, masih tahun depan," katanya.

Menurutnya, keberadaan BTS yang terintegrasi dengan layanan Transjatim akan menjadi solusi dari berbagai persoalan transportasi di Kota Malang. Terutama keluhan dari kalangan mahasiswa sebagai mayoritas pengguna transportasi publik di kota ini.

Lebih lanjut, Mia menilai keberadaan Transjatim dan BTS tidak akan menambah kemacetan. Justru, sistem transportasi publik yang terkonsep dan menjangkau titik strategis dinilai akan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Asalkan bisa masuk ke wilayah-wilayah yang memang menjadi titik kumpul masyarakat dan itu strategis," ucapnya.

Ia menambahkan, skema feeder nantinya perlu dikonsepkan secara matang. Agar angkot dapat menjangkau wilayah-wilayah permukiman atau titik kumpul yang selama ini belum terlayani dengan baik oleh angkutan umum.

"Nah ini yang perlu dikonsepkan baik-baik. Titiknya dari feeder dan lain sebagainya. Kota Malang kan kecil. Jadi nanti kita tinggal konsepkan saja, sih," pungkasnya.

Sementara itu, dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, sempat menjelaskan bahwa BTS juga dirancang untuk menjangkau wilayah yang selama ini sulit diakses oleh transportasi umum. Salah satu prioritas yakni kawasan perkampungan yang minim trayek.

Menurutnya, Dishub telah menyusun trayek dan desain rute berdasarkan hasil kajian. Dengan fokus pada enam lokasi, terutama yang berada di sekitar kawasan mahasiswa dan perkampungan.

“Sementara ini ada 6 lokasi terutama daerah mahasiswa, gimana caranya kampung-kampung bisa dimasukin layanan ini," jelasnya. (Santi/Dya)

DPRD Kabupaten Malang Sahkan Perubahan KUA-PPAS 2025

Tegaskan Komitmen Efisiensi dan Pembangunan Berkelanjutan

MALANG - DPRD Kabupaten Malang resmi mengesahkan kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, pada Kamis (19/6/2025).

Ketua DPRD Kota Malang, Darmadi, mengatakan pengesahan ini menjadi langkah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Serta meningkatkan efisiensi anggaran daerah, sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

"Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Malang tahun 2025 dilaksanakan lebih awal. Karena sebagai tindak lanjut dari Inpres 1 Tahun 2025, juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri," ujar Darmadi dikutip Senin (23/6/2025).

Dalam nota perubahan tersebut, menurutNya pendapatan daerah Kabupaten Malang direncanakan sebesar Rp4,828 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,68 persen atau sekitar Rp32,988 miliar dibandingkan APBD induk 2025 yang semula ditetapkan sebesar Rp4,861 triliun.

Secara rinci, Darmadi menyebutkan, pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,207 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,610 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp11,035 miliar.

"Meski terjadi penyesuaian pada sisi pendapatan, justru pada sisi belanja daerah terjadi peningkatan. Belanja daerah Kabupaten Malang naik sebesar 2,23 persen atau sekitar Rp112,135 miliar menjadi Rp5,133 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp5,021 triliun," katanya.

Darmadi menambahkan, peningkatan ini salah satunya terjadi pada pos belanja modal yang naik 5,26 persen. Dari yang semula sebesar Rp640,447 miliar, menjadi Rp674,117 miliar setelah penyesuaian, atau bertambah Rp33,670 miliar.

"Perubahan ini merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), berdasarkan evaluasi kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah," katanya.

Sementara itu, pada sisi pembiayaan daerah, menurutnya juga dilakukan penyesuaian akibat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Salah satu unsur penting dalam penyesuaian ini adalah penetapan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pengesahan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Malang TA 2025. (dok. Humas DPRD Kabupaten Malang)

Menanggapi pengesahan perubahan KUA-PPAS tersebut, Bupati Malang, Sanusi, meminta agar seluruh perangkat daerah segera melakukan tindak lanjut dengan menyusun perubahan RKA secara tepat waktu dan sesuai aturan. (Santi/Dya)

THAILAND GOYAH, KONFLIK DENGAN KAMBOJA PICU KRISIS POLITIK

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berbicara dalam konferensi pers menyusul kebocoran percakapan telepon antara dirinya dan Hun Sen, mantan perdana menteri Kamboja yang berpengaruh, di tengah sengketa perbatasan antara kedua negara, di Gedung Pemerintah, di Bangkok, Thailand, Kamis (19/6/2025). (REUTERS)

Pemerintah Thailand menyatakan pada Senin (23/6/2025) bahwa mereka akan tetap melanjutkan agenda perombakan kabinet dalam pekan ini, meskipun menghadapi tekanan keras atas cara mereka menangani sengketa perbatasan dengan Kamboja situasi yang membuat posisi Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berada di ujung tanduk.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja terus memburuk, setelah Kamboja meng-umumkan serangkaian langkah balasan yang memicu sentimen nasionalis di kedua negara. Langkah tersebut juga mengganggu hubungan dagang bilateral, termasuk penangguhan seluruh impor bahan bakar dan gas dari Thailand oleh Phnom Penh yang mulai berlaku pada Senin (23/6/2025).

Di Bangkok, hanya beberapa hari setelah koalisi pemerintahan pimpinan Partai Pheu Thai di bawah Paetongtarn terancam akibat mundurnya sejumlah anggota aliansi utama, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai berupaya menampilkan citra persatuan di tengah krisis politik.

"Saya 100% yakin bahwa kami akan bergerak maju dengan kuat setelah perombakan kabinet selesai minggu ini," katanya kepada wartawan.

"Anda akan melihat cara kerja baru yang berbeda dari sebelumnya."

Paetongtarn, politisi muda berusia 38 tahun dan putri mantan PM Thaksin, mendapat kritik tajam setelah rekaman percakapannya dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen bocor ke publik pekan lalu.

Dalam rekaman audio yang dirilis lengkap oleh Hun Sen setelah kebocoran awal sebuah klip, Perdana Menteri Thailand tampak merendahkan diri di hadapan politisi Kamboja dan juga merendahkan seorang komandan militer senior Thailand yang bertanggung jawab atas wilayah perbatasan yang disengketakan.

Beberapa jam setelah rekaman audio itu diketahui publik, anggota koalisi terbesar kedua, Partai Bhumjaithai, keluar dari pemerintahan, sehingga mayoritas parlemennya dan jabatan perdana menteri Paetongtarn terancam.

Pheu Thai berhasil menjaga sisa koalisinya tetap bersatu, dengan perombakan kabinet yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kembali posisi menteri yang sebelumnya dipegang oleh Bhumjaithai.

Stabilitas koalisi akan diuji di parlemen, yang akan bersidang lagi minggu depan, dan di jalan-jalan ketika kelompok anti-pemerintah merencanakan protes besar untuk menuntut pengunduran diri perdana menteri yang akan dimulai pada hari Sabtu.

Yang menambah tekanan, Paetongtarn juga menghadapi pengawasan ketat dari badan peradilan setelah sekelompok senator yang menuntut pemecatannya mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan badan antikorupsi untuk menyelidiki perilakunya terkait panggilan telepon yang bocor itu.

"Pemerintah tidak bisa menganggap remeh apa pun," kata Titipol Phakdeewanich, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani.

"Akan ada lebih banyak ketidakstabilan di masa depan." (Reuters, ist/nei)

KONFLIK THAILAND-KAMBOJA

AKAR MASALAH

- **Peta Warisan Kolonial:** Kamboja pakai peta Prancis (1904–1907) yang diakui ICJ (1962); Thailand pakai peta nasional sendiri → muncul zona abu-abu di perbatasan 817 km.
- **Klaim Tambahan Kamboja:** Minta ICJ interpretasi ulang atas 4 kuil tambahan (Ta Moan, Ta Krabei, dll).
- **Mandeknya Perundingan Bilateral:** Komisi batas JBC macet; Kamboja pilih jalur hukum, Thailand tetap ingin negosiasi langsung.
- **Politik & Nasionalisme:** Sengketa dipakai elite politik untuk agenda domestik.

REAKSI & ESKALASI

- **Bentrokan Militer (Mei 2025):** Insiden di Segitiga Zamrud tewaskan 1 tentara Kamboja → ketegangan meningkat.
- **Leverage Ekonomi Thailand:** Penutupan perbatasan pengaruhi 500.000 pekerja Kamboja; ancaman hilangnya remitan $1,25 miliar (2022).
- **Balasan Kamboja:** Ancaman putus pasokan energi, budaya pop Thailand, imbauan pekerja pulang.
- **Diplomasi Retak:** Saling sindir di media sosial; Hun Sen bocorkan percakapan pribadi dengan PM Paetongtarn.
- **Hubungan Personal Rusak:** Hun Sen nyatakan persahabatan 30 tahun dengan keluarga Shinawatra berakhir.
- **Geopolitik & Aliansi:** Kamboja dekat Tiongkok; Thailand sekutu AS namun juga merapat ke Tiongkok.
- **Media & Opini Publik:** Thailand: militer lebih dipercaya. Kamboja: 93,6% dukung sikap pemerintah, 99,8% setuju bawa ke ICJ.

PM Paetongtarn Tolak Mundur, Klaim Koalisi Masih Solid

PERDANA Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, yang sedang menghadapi tekanan untuk mundur, menyatakan pada Minggu (22/6/2025) bahwa seluruh mitra koalisinya telah berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahannya.

"Saya akan berusaha menjaga stabilitas politik untuk mengatasi ancaman keamanan nasional," ujar Paetongtarn, seperti dikutip Channel News Asia, Senin (23/6/2025).

Paetongtarn mendapat kecaman karena dinilai salah menangani konflik perbatasan dengan Kamboja, yang memuncak setelah rekaman percakapannya dengan Hun Sen bocor. Dalam audio lengkap yang dirilis Hun Sen, Paetongtarn terdengar merendah dan meremehkan seorang jenderal Thailand, memicu kritik dari lawan politik maupun mantan pendukungnya.

Mitra koalisi utama, Partai Bhumjaithai, segera mundur dari aliansi setelah kebocoran tersebut menyebar. Langkah ini mengancam posisi Paetongtarn dan mayoritas parlemen yang dibentuk oleh partainya, Pheu Thai.

"Negara ini harus maju. Thailand harus bersatu dan mendorong kebijakan untuk memecahkan masalah bagi rakyat," tulis Paetongtarn di X setelah pertemuan dengan mitra koalisi, termasuk partai United Thai Nation (UTN).

Sebelum unggahan tersebut, UTN tampaknya akan menuntut pengunduran dirinya sebagai imbalan atas dukungannya terhadap koalisi yang berkuasa.

Pemerintah dan militer yang berpengaruh di negara itu memiliki posisi yang sama, untuk mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan mengikuti ketentuan konstitusi, kata pemimpin berusia 38 tahun itu, seorang pemula politik yang diangkat sebagai perdana menteri tahun lalu.

Para aktivis yang di antaranya merupakan kelompok yang memiliki sejarah demonstrasi terhadap pemerintahan Shinawatra, telah menjadwalkan aksi protes pengunduran diri Paetongtarn di Bangkok pada 28 Juni mendatang. (Channel News Asia, Reuters, ist/nei)

Habbatussauda, Herbal Ampuh untuk Kesehatan Wanita

Habbatussauda dikenal memiliki berbagai manfaat alami yang mendukung kesehatan tubuh wanita. Herbal ini dipercaya mampu membantu proses penurunan berat badan serta merawat kesehatan kulit. Tak heran jika banyak wanita memilihnya sebagai suplemen harian untuk menunjang gaya hidup sehat.

Habbatussauda, dikenal juga sebagai jintan hitam (Nigella sativa), merupakan tanaman herbal yang telah lama dimanfaatkan sebagai bumbu dapur sekaligus bahan dalam pengobatan tradisional. Biji tanaman ini biasa diolah menjadi minyak, kapsul, atau serbuk dan digunakan sebagai suplemen untuk menunjang kesehatan serta meningkatkan daya tahan tubuh.

Selain itu, habbatussauda juga diyakini memiliki beragam manfaat kesehatan, termasuk yang khusus bermanfaat bagi wanita. Khasiat ini berasal dari kandungan senyawa aktif di dalamnya, seperti thymoquinone, flavonoid, dan carvacrol, yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi.

Berikut ini adalah berbagai manfaat habbatussauda untuk wanita yang bisa Anda peroleh:

Menurunkan berat badan

Salah satu potensi manfaat habbatussauda untuk wanita adalah membantu menurunkan berat badan. Potensi ini berasal dari kandungan senyawa aktif thymoquinone, flavonoid, dan carvacrol yang membantu proses pembakaran kalori menjadi lebih efisien. Namun, efek ini masih perlu diteliti lebih lanjut.

Selain itu, serat dan protein yang terkandung di dalam habbatussauda juga dapat membantu menekan nafsu makan secara alami dan membantu mengurangi asupan kalori harian. Agar manfaat habbatussauda lebih maksimal, Anda perlu imbangi dengan berolahraga secara rutin minimal 30 menit per hari, ya.

Mendukung keseimbangan hormon

Beberapa studi praklinis menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dalam habbatussauda, seperti thymoquinone dan flavonoid, berpotensi **mendukung keseimbangan hormon.**

Potensi ini dinilai dapat berkontribusi pada keteraturan siklus menstruasi serta mengurangi keluhan pramenstruasi (PMS) dan gejala menopause, seperti hot flashes, perubahan suasana hati, dan gangguan tidur. Namun, manfaat ini masih perlu dibuktikan melalui uji klinis pada manusia.Oleh karena itu, bila Anda mengalami keluhan terkait menstruasi atau menopause, sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan habbatussauda sebagai suplemen.

Membantu menjaga kesehatan kulit

Manfaat habbatussauda untuk wanita selanjutnya adalah membantu menjaga kesehatan kulit. Khasiat ini diperkirakan berasal dari kandungan zat aktif, seperti thymoquinone yang bersifat antiradang, antibakteri, dan antioksidan. Hal tersebut berpotensi mengurangi jerawat dan melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas.Untuk mendukung manfaat tersebut, Anda disarankan untuk minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, konsumsi makanan tinggi nutrisi lainnya, serta gunakan sunscreen, ya. Dengan begitu, kesehatan kulit Anda akan tetap terjaga.

Mendukung kesehatan rambut

Ekstrak minyak habbatussauda mengandung asam lemak esensial dan sejumlah senyawa antioksidan, antiradang, antibakteri, dan antijamur berupa thymoquinone. Senyawa ini berpotensi mendukung kesehatan kulit kepala dan rambut.

Selain itu, sejumlah vitamin dan mineral yang terkandung dalam habbatussauda pun turut berkontribusi guna menguatkan akar rambut, mengurangi kerontokan, dan membuat rambut tampak berkilau.Namun, berbagai efektivitas habbatussauda ini masih perlu diteliti lebih lanjut melalui uji klinis pada manusia. Oleh karena itu, habbatussauda sebaiknya tidak dijadikan sebagai pengganti perawatan rambut secara medis, ya.

Memperkuat daya tahan tubuh

Manfaat habbatussauda untuk wanita selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat ini diperoleh dari senyawa aktif dan sejumlah vitamin yang bersifat antioksidan, antiradang, dan antibakteri yang berguna menangkal efek negatif dari paparan radikal bebas pemicu penyakit.

Untuk mendukung manfaat tersebut, Anda juga disarankan untuk konsumsi variasi makanan sehat dan bernutrisi lainnya serta rutin berolahraga minimal 30 menit per hari. Dengan begitu, tubuh menjadi lebih sehat meskipun efek ini belum terbukti secara pasti dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Mendukung penyembuhan luka di kulit

Selain mendukung peningkatan daya tahan tubuh, habbatussauda juga berpotensi mempercepat penyembuhan luka. Potensi ini didukung oleh hasil studi laboratorium yang menunjukkan bahwa thymoquinone memiliki sifat antioksidan dan antiradang.

Bahkan, sejumlah vitamin yang terkandung dalam habbatussauda turut andil dalam meningkatkan kelembapan kulit dan produksi kolagen guna mendukung proses pergantian kulit yang sehat. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas habbatussauda dalam menyembuhkan luka di kulit.Untuk mendukung manfaat habbatussauda untuk kesehatan, Anda disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti tidur 8 jam per hari, minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, olahraga minimal 30 menit per hari, jangan merokok, batasi konsumsi minuman beralkohol, serta konsumsi variasi makan sehat dan tinggi nutrisi lainnya. (nei,ist/dya)

AI Coding Setara Intern, Target Menjadi Profesional

CEO OpenAI dan pencipta ChatGPT, Sam Altman, mengungkap pandangannya terkait kemampuan AI dalam pengembangan perangkat lunak. Ia menyebut bahwa asisten coding berbasis AI saat ini masih setara dengan "anak magang", namun memprediksi bahwa kemampuannya akan berkembang pesat hingga mampu menyaingi para insinyur berpengalaman dalam waktu dekat.

Dalam ajang Snowflake Summit 2025 yang digelar di San Francisco, California, AS, Altman menjelaskan bahwa layaknya seorang magang yang awalnya hanya mampu bekerja beberapa jam, AI juga akan berkembang secara bertahap hingga mampu menyamai kemampuan insinyur perangkat lunak senior.

"Saat ini (AI coding assistant) seperti pekerja magang yang dapat bekerja selama beberapa jam, tetapi pada titik tertentu ia akan menjadi seperti software engineer berpengalaman yang dapat bekerja selama beberapa hari," kata Sam Altman, CEO OpenAI.

Komentarnya menggarisbawahi dampak transformatif AI terhadap industri teknologi, terutama pada peran yang terkait dengan coding atau bahasa pemrograman.

Altman juga memprediksi, pada tahun depan, kita mungkin mulai melihat agentic AI yang mampu memecahkan masalah bisnis yang rumit dan bahkan menemukan pengetahuan baru.

Agentic AI bidang coding assistant mengacu pada masa depan di mana sistem AI dapat bekerja secara independen dan menangani tantangan coding yang rumit, merancang arsitektur perangkat lunak yang rumit, dan juga berkontribusi pada keputusan pengembangan strategis dengan intervensi manusia yang lebih sedikit.

Bagi para software engineer, visi Sam Altman menandakan adanya pergeseran dalam peran mereka. Alih-alih melakukan coding rutin, para insinyur perangkat lunak harus meningkatkan bidang keahlian mereka dan berfokus pada hal-hal seperti mengelola proyek-proyek AI yang kompleks, memastikan penerapan AI yang etis, dan berinovasi pada kemampuan AI saat ini.

Komentar Altman muncul di tengah meningkatnya perdebatan mengenai dampak AI terhadap ketenagakerjaan.

Baru-baru ini, CEO Anthropic, Dario Amodei, memperingatkan bahwa artificial intelligence dapat menghilangkan 50% pekerjaan kerah putih tingkat pemula dalam lima tahun ke depan, yang berpotensi meningkatkan pengangguran di AS hingga 20%. Hal ini disampaikan Amodei dalam sebuah wawancara kepada media Axios.

Prediksi yang mengejutkan ini muncul seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi AI, dengan sektor-sektor seperti teknologi, keuangan, hukum, dan konsultasi menghadapi gangguan terbesar, atau disrupsi.

"Kami, sebagai produsen teknologi ini, memiliki tugas dan kewajiban untuk bersikap jujur tentang apa yang akan terjadi," kata Dario Amodei, CEO Anthropic.

CEO berusia 42 tahun itu menekankan bahwa sebagian besar orang masih belum menyadari transformasi yang akan terjadi, menyebutnya sebagai kenyataan yang "terdengar gila, dan orang-orang tidak mempercayainya."

CEO Nvidia, Jenseng Huang, menyatakan ketidaksetujuannya yang tajam dengan prediksi CEO Anthropic, Dario Amodei, tentang otomatisasi pekerjaan yang digerakkan oleh AI selama jumpa pers di Viva Technology di Paris pada pertengahan Juli 2025.

Huang secara khusus menantang klaim Amodei baru-baru ini bahwa AI dapat menghilangkan hingga 50% pekerjaan kerah putih tingkat pemula dalam waktu lima tahun, menepis anggapan tersebut sebagai sesuatu yang terlalu meningkatkan kekhawatiran publik.

"Saya sangat tidak setuju dengan hampir semua yang dikatakan [Amodei]," kata Huang, mengkritik tiga poin penting yang dikaitkannya dengan Amodei: bahwa AI sangat berbahaya sehingga hanya beberapa orang terpilih yang boleh mengembangkannya, bahwa AI terlalu mahal untuk dikembangkan secara luas, dan bahwa kekuatannya akan menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan.

"Jika Anda ingin segala sesuatunya dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab, lakukanlah secara terbuka... Jangan melakukannya di ruangan gelap dan katakan kepada saya bahwa itu aman," imbuh Jensen Huang, yang mengadvokasi pengembangan AI yang transparan dan kolaboratif. (nei,ist/dya)

HARIAN LENTERA TODAY
Inspirasi Perubahan

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021

MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO **I GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) **I MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH **I LAMONGAN:** L HANDI **I BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA **I KEDIRI:** GATOT SUNARKO **I JOMBANG :** SUTONO **I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO **I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO **I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN **I TRENGGALEK:** TINA W **I NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO **I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN **I LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN **I PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH **I MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN **I SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN **I ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 91205006801134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Tren Warna dan Tekstur Tas Spring-Summer Tahun 2025

Setiap musim membawa suasana dan karakteristiknya yang khas, menciptakan pesona dan daya tarik tersendiri. Nuansa ini pun kerap tercermin dalam pilihan gaya busana yang berkembang. Misalnya, musim semi identik dengan sentuhan ceria, feminin, dan segar, sedangkan musim panas sering diasosiasikan dengan tampilan yang santai dan penuh energi. Namun, dunia fashion terus bergerak—selalu ada hal baru yang muncul setiap tahunnya.

Di musim semi dan musim panas tahun ini, berbagai tas tampil memikat dengan warna-warna cerah dan tekstur yang menarik perhatian. Mulai dari nuansa pistachio ice dan mustard, hingga bahan seperti tweed dan eyelet, semuanya dirancang untuk menyempurnakan gaya busanamu dan menciptakan tampilan yang menawan.

Pada musim semi dan musim panas kali ini, Mustard menjadi salah satu warna yang disorot banyak brand. Warna yang dikategorikan sebagai earthy tone ini dapat dijadikan sebagai alternatif dari warna netral dan vibrant.

Warna ini pun menjadi pelengkap sempurna untuk tampilan yang cenderung sederhana berkat warnanya yang kontras dan standout. Spring-Summer 2025 pun kerap dikaitkan dengan tema "grounding & reconnecting with nature" dan warna Mustard ini sangat sejalan dan sesuai dengan konsep tersebut.

Pistachio Ice

Senada dengan musim semi yang identik dengan nuansa sejuk, natural, dan menenangkan, Pistachio Ice ini menjadi salah satu warna favorit di musim ini. Warna ini menjadi perwujudan sempurna dari palet warna soft naturals yang sedang booming di dunia mode.

Bagi kamu yang ingin ciptakan tampilan yang seimbang dan versatile namun tetap memiliki sentuhan modern, warna ini menjadi pilihan yang sangat tepat. Tas dengan warna ini sangat cocok kamu padukan dengan baju berwarna netral atau pastel untuk hadirkan tampilan musim semi dan panas yang hangat dan elegan.

Butter Yellow (Kuning Mentega)

Warna kuning mentega (butter yellow) mendominasi banyak koleksi tas tangan di musim Spring-Summer 2025 karena mampu menghadirkan kesan hangat, manis, dan lembut dalam satu tampilan. Nuansanya yang lembut menjadikannya pilihan yang mudah dipadupadankan, baik dengan outfit kasual sehari-hari maupun gaya feminin yang lebih elegan. Warna ini juga memberikan sentuhan optimis dan ringan, sangat cocok dengan suasana musim semi yang identik dengan kebangkitan dan awal yang baru. Kuning mentega juga bekerja sangat baik sebagai warna transisi antara musim semi dan musim panas.

Tangerine Orange

Oranye cerah seperti tangerine menjadi warna mencolok dalam tren tas tangan Spring-Summer 2025 karena memberi kesan semangat, ceria, dan playful. Warna ini cocok untuk tampil menonjol tanpa berlebihan, terutama di musim panas yang cerah.

Tangerine banyak digunakan pada tas berukuran kecil seperti mini bag dan clutch, sering dipadukan dengan warna tanah atau putih untuk tampilan segar dan seimbang. Dengan energi visual yang kuat, tangerine menjadi warna statement yang banyak dicari tahun ini.

Tweed

Beralih ke aplikasi tekstur, Spring-Summer 2025 terasa tak lengkap tanpa kehadiran tweed atau wol. Biasa diasosiasikan dengan musim gugur, kali ini tweed berkembang menjadi simbol gaya hidup modern yang nostalgic dan ekspresif, khususnya pada aksesori seperti tas.

Pada musim semi dan panas, orang-orang cenderung mengenakan pakaian ringan, sehingga tekstur tweed pada tas mampu menjadi titik fokus dari tampilanmu. Pada tekstur tweed, desainer pun dapat menghadirkan permainan warna dengan twist yang playful dan bold.

Eyelet

Tas bermotif eyelet menjadi salah satu tren yang sangat diminati berkat siluetnya yang tampak ringan dan kaya akan tekstur ciptakan tampilan yang tidak membosankan. Tas ini kerap menjadi pilihan pecinta mode yang ingin tampil modern, minimalis, dan clean.Motifnya yang berlubang menciptakan kesan breathable sehingga cocok dengan tampilan musim semi dan musim panasmu. Selain itu, kombinasi tas motif eyelet dengan warna putih, pastel, atau earthy tones membuat tas tampak lebih hidup, artistik, dan segar. (nei,ist/dya)

Usai Nadiem (dari Hal 1) ...

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Kejaksaan Agung. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi pengadaan chromebook periode 2019-2022.

"Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap proses hukum," kata Nadiem di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

Dia mengatakan pemeriksaan hari ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dia pun mengapresiasi sikap para penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan proses hukum dengan baik, mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan asas praduga tidak bersalah.

"Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama," ucap Nadiem.

Nadiem mengemukakan kehadirannya hari ini sebagai bentuk kepercayaan bahwa penegakan hukum di Indonesia selalu adil dan transparan. Sebab, hal itu merupakan pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

Namun, Nadiem enggan menjawab jumlah pertanyaan yang ditanyakan penyidik kepadanya. Dia berdalih bahwa keluarganya sudah menunggu di rumah.

"Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu," katanya sambil berlalu.

Ketika datang pagi harinya, Nadiem tampak didampingi tim penasihat hukumnya. Ia menggunakan kemeja batik berwarna krem dan buru-baru masuk, tanpa berbicara sepatah kata pun kepada awak media.

Ditemui sebelumnya, Nadiem mengatakan bahwa program pengadaan laptop Chromebook digunakan oleh mayoritas sekolah penerima dan berdampak nyata pada proses pembelajaran.

Nadiem menjelaskan, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi terhadap ancaman learning loss saat pandemi Covid-19.

Program ini, katanya, mencakup pengadaan laptop, modem, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta peningkatan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer (ANBK).

Program ini, katanya, mencakup pengadaan laptop, modem, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta peningkatan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer (ANBK).

Program digitalisasi itu dijalankan sepanjang 2019 hingga 2022 dengan anggaran total mencapai Rp9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,58 triliun bersumber dari dana satuan pendidikan dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam pembelaannya, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan harga pembelian yang bahkan lebih murah dari harga katalog.

"Laptop yang dibeli sekitar Rp5 jutaan, padahal harga di e-katalog saat itu sekitar Rp6-7 juta. Jadi tidak ada markup," ujar Hotman.

Status Perkara Naik Sejak Mei

Namun, Kejaksaan Agung mengungkap temuan berbeda. Penyidik menemukan dugaan adanya pemufakatan jahat dalam pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut.

Kajian teknis disebut-sebut diarahkan untuk merekomendasikan penggunaan Chromebook, meski hasil uji coba 1.000 unit pada 2019 menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif sebagai sarana pembelajaran.

Penyidikan juga menyasar aset milik orang-orang dekat Nadiem. Tiga apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem (Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim) telah digeledah.

Penyidikan juga menyasar aset milik orang-orang dekat Nadiem. Tiga apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem (Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim) telah digeledah.

Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Agung mengungkap bahwa vendor pengadaan chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak dipilih berdasarkan proses lelang.

"Dari informasi yang kita peroleh bahwa ini dilakukan secara e-katalog. Jadi nanti akan didalami lagi seperti apa kebenarannya, dan bagaimana prosesnya, dan bagaimana keterkaitan keikutsertaan para vendor di situ, apakah satu vendor, dua vendor, dan seterusnya. Tidak melalui proses pelelangan biasa," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (13/6/2025).

Kejagung telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025.

Harli menjelaskan dalam sistem e-katalog ini para vendor sudah menyertakan nilai barang yang diajukan. Terdapat spesifikasi khusus chromebook yang kemudian akan dipilih pihak penyelenggara.

"Dan itu e-katalog itu baik, e-katalog itu baik, dan itu yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam sistem pengadaan. Supaya apa, supaya karena dia kan tidak ada lagi misalnya pertemuan-pertemuan, dalam rangka memitigasi, adanya tindakan-tindakan korupsi misalnya," tutur Harli.

Sejauh ini, Kejagung telah memeriksa 28 saksi, termasuk tiga anggota staf khusus menteri yang kediamannya sudah digeledah penyidik, yakni Jurist Tan, Fiona Handayani, dan Ibrahim Arief. Ketiganya pun sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Pencegahan dilakukan karena mereka tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi.

Dari kediaman Fiona, penyidik menyita 1 laptop dan 4 telepon genggam. Di tempat tinggal Jurist, penyidik menyita 2 hardisk eksternal, 1 diska lepas, dan 1 laptop. Selain itu, penyidik juga menyita 15 buku agenda. Adapun dari kediaman Ibrahim, penyidik menyita telepon genggam dan laptop.

"Per 4 Juni 2025 penyidik sudah meminta pencegahan dilakukan dan itu sudah," kata Harli Siregar. (wid,din, ist,ant/dya)

Sudah 424 Korupsi Sektor Pendidikan Ditindak

INDONESIA Corruption Watch (ICW) meragukan bahwa pihak yang terlibat kongkalikong dalam proyek senilai Rp 9,9 triliun ini hanya di level staf khusus menteri. Sebab, staf khusus tidak mempunyai kewenangan langsung dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Untuk itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu terus mengembangkan kasus ini dengan menelusuri peran masing-masing staf khusus dan si pemberi perintah kepada mereka. Selain itu, bentuk korupsi hingga taksiran dugaan kerugian negara pun perlu diungkap.

"Pihak lain dari pelaku pengadaan yang perlu diperiksa oleh penyidik Kejagung di antaranya pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran, dan Nadiem Makarim selaku menteri atau pengguna anggaran," kata Almaz Sjafrina, peneliti ICW, dalam keterangannya, dikutip Senin (23/6/2025).

Almaz menjelaskan, dalam proses pengadaan melalui metode e-purchasing dengan nilai di atas Rp 200 juta, PPK merupakan pihak sentral. PPK berwenang merencanakan dan melaksanakan pengadaan serta bertanggung jawab melapor kepada pengguna anggaran (menteri) atau kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk oleh menteri.

Korupsi di sektor pendidikan, mengutip temuan ICW, banyak berkutat di penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan 52 kasus (21,7% dari keseluruhan). Lalu di belakangnya ada korupsi pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang atau jasa—buku, arsip, e-learning—yang bersumber dari beragam program dan anggaran.

Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis KPK menemukan 12% sekolah masih menyalahgunakan dana BOS dengan modus bervariasi, dari pemotongan dana, nepotisme, sampai laporan fiktif.

Penyelewenang dana BOS seperti 'melengkapi' deretan masalah lain yang didapati KPK di sektor pendidikan: pungutan liar, kongkalikong penyediaan barang dan jasa, penggelembungan biaya, serta manipulasi dokumen.

Selain BOS, korupsi menyasar dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diresmikan pada 2017 oleh Kemendikbudristek, bertujuan untuk membantu siswa dari kelompok rentan.

Anggaran PIP bisa dikata sangat besar, menyentuh Rp9,6 triliun pada 2022—untuk target 17,9 juta anak. Siswa yang tidak mampu, agar terhindar dari putus sekolah, berhak memperoleh bantuan dalam wujud uang tunai sebanyak Rp225 ribu sampai Rp1 juta.

Realita berkata lain. PIP jadi bancakan korupsi. Pantauan ICW memperlihatkan terdapat lebih dari 30 dugaan kasus korupsi dana PIP di seluruh Indonesia pada 2022. Estimasi kerugian negara menyentuh Rp960 miliar sampai Rp1,9 triliun.

Polanya: dana PIP dipotong dengan dalih "biaya administrasi" atau "tunggakan SPP." Lalu, ada juga yang membawa kabur uang bantuan itu tanpa pernah tersalurkan ke tangan siswa.

Di Tasikmalaya, pada 2022, dugaan korupsi dana PIP merugikan murid-murid di hampir 300 sekolah.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menuturkan akar korupsi di sektor pendidikan dipicu tata kelola yang lemah, termasuk mekanisme pengawasan serta transparansi.

Sementara di lain sisi, uang yang dianggarkan untuk pendidikan tak sedikit. Sejak 2020 sampai 2025, anggaran pendidikan dari pemerintah pusat konsisten mengalami kenaikan. Tahun ini, ambil contoh, Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp724 triliun—meningkat dari 2024, Rp665 triliun.

"Sayangnya, uang dengan perputaran yang besar itu tidak diatur dengan baik, tidak ditujukan untuk manfaat yang sebenarnya," ucap Ubaid.(wid,rls,voi,ist/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

DPRD Jatim Harapkan Perlindungan Menyeluruh Perempuan dan Anak Lewat Raperda Inisiatif

SURABAYA — DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim)melalui Komisi E mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk merespons tingginya kasus kekerasan terhadap kelompok rentan tersebut. Serta memastikan hak-hak perempuan dan anak lebih terlindungi secara menyeluruh dan terintegrasi.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (23/6/2025)

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono menyampaikan, Komisi E melalui pandangan dan usulan terkait raperda tersebut merupakan bentuk komitmen legislatif dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.

"Pandangan Komisi E DPRD Jatim ini akan menjadi masukan yang konstruktif untuk menjadi bahan penyusun peraturan dan membangun Jawa Timur yang inklusif," ungkap Blegur dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (23/6/2026).

Raperda ini disusun atas dasar evaluasi terhadap dua regulasi sebelumnya. Pertama, Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dan kedua adalah Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Keduanya dinilai sudah tidak relevan lagi terhadap perkembangan hukum, situasi sosial, dan dinamika kasus yang terjadi di lapangan.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menegaskan raperda tersebut didorong oleh tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi secara masif di Jawa Timur. Menurutnya, kerangka hukum saat ini belum memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan yang ada.

"Perda inisiatif perempuan dan anak ini digagas Komisi E karena melihat masih terdapat banyak kasus terkait perempuan dan anak. Ada anak korban pedofilia, pekerja seks, dan terkena narkotika. Pun perempuan juga mengalami hal yang sama," ujar Sri Untari.

Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut menambahkan, perlindungan yang ideal terhadap perempuan dan anak harus dimulai sejak dini. Termasuk di lingkungan keluarga, sekolah, dan ruang publik. Karena itu, Komisi E merasa penting untuk memperbaiki substansi perda sebelumnya dan menggabungkannya ke dalam satu regulasi yang lebih komprehensif.

"Maka kita ingin melindungi anak-anak di Jawa Timur supaya mereka dapat hidup sehat, bisa tumbuh dan berumur panjang, serta mampu mencapai cita-cita mereka dengan lingkungan yang mendukung," lanjutnya.

Sri juga menyoroti fenomena kekerasan berbasis daring yang kian marak. Menurutnya, kejahatan seksual, eksploitasi dan perundungan di dunia maya menjadi tantangan baru dalam perlindungan perempuan dan anak yang harus dijawab oleh kebijakan yang adaptif dan berpihak.

Data resmi yang dikutip oleh juru bicara Komisi E, Puguh Wiji Pamungkas, menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih berada dalam angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 972 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1.531 kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Timur. Sementara pada tahun 2024, tercatat 771 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1.103 kasus kekerasan terhadap anak.

"Bentuk kekerasan yang dominan adalah kekerasan seksual, yang menunjukkan bahwa ruang aman bagi kelompok rentan ini masih sangat terbatas," terang Puguh.

Soroti Praktik Pernikahan Dini

Ia juga menyinggung soal maraknya praktik pernikahan dini atau perkawinan anak, yang turut berkontribusi terhadap pelanggaran hak anak secara sistemik. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama, angka dispensasi kawin di Jawa Timur terus meningkat sejak perubahan batas usia perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 5.799 kasus dispensasi kawin, melonjak menjadi 17.214 kasus pada tahun 2020. Meski mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya masih tinggi yakni 12.334 kasus pada tahun 2023 dan 8.753 kasus hingga pertengahan 2024.

"Perkawinan anak berdampak langsung terhadap hilangnya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Karena itu, raperda ini akan menjadi payung hukum untuk mencegah praktik-praktik tersebut secara lebih efektif," jelas Puguh.

Puguh menambahkan, raperda ini juga menjadi instrumen untuk menjawab tantangan zaman, termasuk perubahan bentuk kekerasan yang terjadi melalui teknologi digital dan media sosial.

"Dengan kerangka hukum yang lebih terintegrasi, penerapan teknologi informasi dalam sistem perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih efektif," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD dan seluruh elemen masyarakat kini diharapkan dapat bergerak bersama agar Jawa Timur menjadi pelopor dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang tangguh, responsif, dan berkeadilan. (adv,pra/dya)

Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono (tengah) dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (23/6/2025).